

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KODE ETIK APARATUR  
SIPIL NEGARA DI BADAN KEPEGAWAIAN  
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA  
SELATAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk memenuhi Sebagian Persyaratan  
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1  
Ilmu Administrasi Publik**



**Oleh:**

**Reza Sulaeman**

**NIM. 07011381520081**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2019**

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KODE ETIK APARATUR SIPIL  
NEGARA DI BADAN KEPEGAWAIAN PEMERINTAH DAERAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1  
Ilmu Administrasi Publik**

**Oleh:**

**REZA SULAEMAN**

**07011381520081**

**Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing, Juli 2019**

**Pembimbing I**

**Drs. Gatot Budiarto, MS  
NIP. 195806091984031002**

**Pembimbing II**

**Drs. Joko Siswanto, M.Si  
NIP. 195706051985031003**

The image shows two handwritten signatures and dates. The top signature is a stylized, looped signature. The bottom signature is written in cursive and appears to be 'Joko Siswanto'. Below the bottom signature, the date '25/7/19' is written.

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KODE ETIK APARATUR  
SIPIL NEGARA DI BADAN KEPEGAWAIAN PEMERINTAH  
DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**SKRIPSI**

Telah dipertahankan di Depan Tim Penguji  
Pada tanggal 25 Oktober 2019  
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

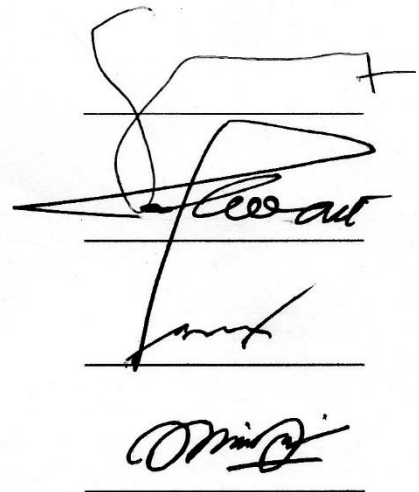
**TIM PENGUJI SKRIPSI**

Drs. Gatot Budiarto, MS  
NIP. 195806091984031002  
Ketua

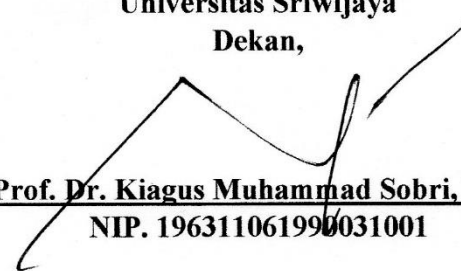
Drs. H. Joko Siswanto, M. Si  
NIP. 195706051985031003  
Anggota

Drs. Mardianto, M.Si  
NIP. 196211251989112001  
Anggota

Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA  
NIP. 198108272009121002  
Anggota



Palembang, Oktober 2019  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Sriwijaya  
Dekan,



Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si  
NIP. 196311061990031001

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : REZA SULAEMAN

NIM : 07011381520081

Judul Skripsi :“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA DI BADAN KEPEGAWAIAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN”

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan Skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri, baik untuk naskah laporan maupun kegiatan Programming yang tercantum sebagai bagian dari Skripsi ini. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Sriwijaya.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Palembang, Maret 2020  
Yang membuat pernyataan,



REZA SULAEMAN  
NIM. 07011381520081

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, yang akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Kebijakan Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Badan Kepegawaian Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan” yang merupakan tugas dan kewajiban guna melengkapi syarat memperoleh gelar Sarjana (S-1) Ilmu Administrasi Negara.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Sehubungan dengan itu, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua dan adik-adik saya yang telah memberikan doa, semangat serta dukungan selama menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya
4. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya dan ibu Ermanovida, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Gatot Budiarto selaku pembimbing I dan bapak Joko Siswanto selaku pembimbing II yang telah membimbing, memberikan ilmu dan masukan yang sangat berarti dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Dwi Mirani selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah membimbing saya selama melaksanakan studi kuliah.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang telah banyak memberikan bimbingannya.
8. Teman-teman seperjuangan Ilmu Administrasi Negara angkatan 2015 yang telah bersama-sama menempuh perkuliahan.
9. Dan terakhir semoga Allah SWT memberikan rahmat, rezeki, dan perlindungannya untuk orang-orang atau nama-nama yang saya sebutkan diatas, serta orang-orang yang tidak bisa disebutkan satu persatu..

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan sebagaimana yang diharapkan. Dengan segenap kerendahan hati penulis mengharapkan saran dari semua pihak demi skripsi ini. Semoga skripsi yang dibuat ini dapat bermanfaat dikemudian hari sebagai referensi yang dapat dipertanggung jawabkan.

Palembang, 2019

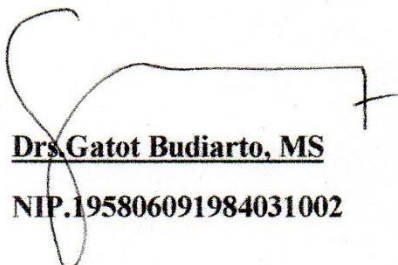
Reza Sulaeman

## ABSTRAK

Penelitian dalam skripsi ini dilatar belakangi oleh permasalahan terkait dengan implementasi kebijakan kode etik. Dalam tercapainya tujuan dari kebijakan kode etik untuk meningkatkan kedisiplinan dan perilaku kode etik yang baik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan kode etik yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam penyelenggaraan kode etik aparatur sipil negara. Metode Penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data meliputi dokumentasi dan wawancara mendalam, dianalisis dengan uji validitas data menggunakan teknik kondensasi data. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan publik dari Edward George III yang dimana terdapat empat dimensi yaitu Transmisi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Hasil dari penelitian ini ditemukan beberapa permasalahan dalam sikap dari para pelaksana kebijakan dan fasilitas yang tersedia, dan Standar Operasional Prosedur yang bersifat sementara. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi kebijakan kode etik yang dilakukan tidak berjalan dengan maksimal karena masih ada fungsi dari implementasi kebijakan kode etik yang tidak terlaksana dengan baik seperti sikap dari pelaksana kebijakan kode etik dan fasilitas yang belum memadai. Saran untuk Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan agar menjalankan dengan semaksimal mungkin agar implementasi kebijakan kode etik berjalan dengan baik.

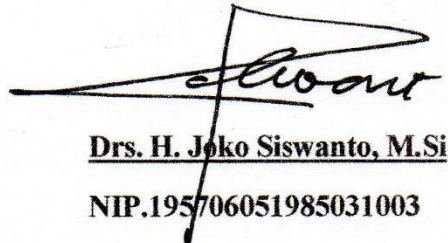
**Kata Kunci : Implementasi Kebijakan Kode Etik , Kode Etik Aparatur Sipil Negara**

**Pembimbing I**



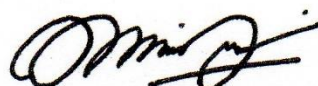
**Drs. Gatot Budiarto, MS**  
NIP.195806091984031002

**Pembimbing II**



**Drs. H. Joko Siswanto, M.Si**  
NIP.195706051985031003

**Inderalaya, November 2019**  
**Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Universitas Sriwijaya**



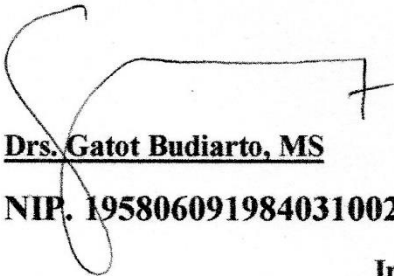
**Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA**  
NIP. 198108272009121002

## ABSTRACT

The research in this thesis is motivated by problems related to the implementation of the code of ethics policy. In achieving the objectives of the code of ethics policy to improve discipline and good ethical codes. The purpose of this study was to find out how the implementation of the code of ethics was carried out by the Regional Personnel Agency of South Sumatra Province in the implementation of the code of ethics of the state civil apparatus. The research method used was descriptive with a qualitative approach. Data collection techniques include documentation and in-depth interviews, analyzed by data validity test using data condensation techniques. This study uses the theory of public policy implementation from Edward George III, where there are four dimensions, namely Transmission, Resources, Disposition and Bureaucratic Structure. The results of this study found several problems in the attitude of the implementers of the available policies and facilities, and the Standard Operating Procedures that are temporary. Based on the results of the research conducted, it can be concluded that the implementation of the code of ethics policy is not working optimally because there is still a function of the implementation of policies that have not been implemented properly such as the attitude of the implementers of the code of ethics and inadequate facilities. Suggestions for the Regional Personnel Board of South Sumatra Province to run as much as possible so that the implementation of the code of ethics policy runs well.

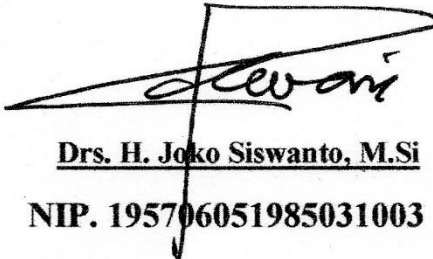
**Keywords :** *Implementation of the Code of Ethics Policy, Code of Ethics of the State Civil Apparatus*

Advisor I



**Drs. Gatot Budiarto, MS**  
NIP. 195806091984031002

Advisor II



**Drs. H. Joko Siswanto, M.Si**  
NIP. 195706051985031003

Inderalaya, November 2019  
Chairman of Public Administration Department  
Faculty of Social and Political Science  
Sriwijaya University



**Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA**  
NIP. 198108272009121002

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR TABEL .....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	x
DAFTAR SINGKATAN .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xii
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
A. Landasan Teori .....	9
1. Konsep Implementasi.....	9
2. Implementasi Kebijakan.....	10
3. Model Implementasi Kebijakan.....	10
B. Teori Yang Digunakan dalam Penelitian .....	14
C. Kerangka Pemikiran .....	20
D. Penelitian Terdahulu.....	21
<b>BAB III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>23</b>
A. Jenis Penelitian .....	23
B. Definisi Konsep .....	23
C. Fokus Penelitian .....	24
D. Jenis dan Sumber Data .....	27
E. Informan Kunci .....	27
F. Teknik Pengumpulan Data .....	28
G. Teknik Keabsahan Data .....	28
H. Teknik Analisis Data.....	31
I. Jadwal Penelitian.....	31
J. Sistematika Penulisan.....	32
<b>BAB IV. GAMBARAN UMUM DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>34</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	34
1. Gambaran Lokasi.....	34
2. Sejarah Singkat.....	34



<b>B. Analisis dan Pembahasan Impelementasi Kebijakan Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan.....</b>	<b>35</b>
<b>a. Komunikasi .....</b>	<b>36</b>
<b>b. Sumber Daya .....</b>	<b>41</b>
<b>c. Disposisi .....</b>	<b>60</b>
<b>d. Struktur Birokrasi .....</b>	<b>63</b>
<b>BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>68</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>68</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>70</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>71</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>72</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
1. Jumlah aparatur sipil negara di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Unit Kerja 2019.....	3
2. Penelitian Terdahulu.....	21
3. Fokus Penelitian.....	25
4. Tahapan-tahapan Kegiatan Dalam Penelitian.....	31
5. Komposisi Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan Maret 2019.....	42
6. Data Nama Kepegawaian Bidang Pembinaan Kepegawaian.....	42
7. Jumlah Ruangan di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan.....	57
8. Fasilitas Prasarana di Instansi Badan Kepegawaian Daerah Prov.Sumsel.....	59

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
1. Ruangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan Pukul 09.45 WIB Jum'at Tanggal 02 November 2018.....	5
2. Kerangka pemikiran : Implementasi Kebijakan Kode Etik Aparatur Sipil Di Badan Kepegawaian Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan.....	20
3. Struktur Organisasi.....	35
4. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No. 48 Tahun 2018 Tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Sumatera Selatan .....	40
5. Bahan Evaluasi Pelaksanaan Nilai Dasar, Kode Etik, dan Kode Perilaku ASN.....	40
6. Banner VISI dan MISI Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan .....	48
7. Lingkungan Kerja Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan .....	48
8. Berita Rakor Kepegawaian Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2019....	49
9. Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama.....	50
10. Pelayana terbuka di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan .....	52
11. Berita BKN Siapkan Lebih Dari 176 Titik Lokasi Untuk Tes Seleksi CPNS 2018.....	53
12. Pencapaian Sasaran Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2013-2018.....	55

## DAFTAR SINGKATAN

BKD	: Badan Kepegawaian Daerah
ASN	: Aparatur Sipil Negara
Prov.Sumsel	: Provinsi Sumatera Selatan
SOP	: Standar Operasional Prosedur
CCTV	: Closed Circuit Television
PemProv	: Pemerintah Provinsi
Pergub	: Peraturan Gubernur

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1. Pedoman Wawancara.....	72
Lampiran 2. Surat Izin Penelitian dari Unsri.....	75
Lampiran 3. Surat Balasan Penelitian dari Kesbangpol.....	76
Lampiran 4. Surat Tugas Skripsi Untuk Seminar Proposal.....	79
Lampiran 5. Surat Tugas Skripsi Untuk Ujian Skripsi.....	80
Lampiran 6. Lembar Konsultasi Bimbingan.....	81
Lampiran 7. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No 48 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Sumatera Selatan.....	85
Lampiran 8. Bahan Evaluasi Pelaksanaan Nilai Dasar, Kode Etik, dan Kode Perilaku ASN.....	104
Lampiran 9. Laporan Triwulan 1.....	105
Lampiran 10. Kartu Inventaris Ruang Per 31.....	109
Lampiran 11. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pegawai Tahun 2016-2018.....	111

## **BAB I**

### **LATAR BELAKANG**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

ASN harus lah bisa menjungjung tinggi martabat instansinya dengan adanya fenomena ASN yang tidak ada berada pada tempat kerjanya selagi jam kerja berlangsung dan menimbulkan kurang efektifnya pegawai yang bersangkutan, sehingga dapat menghambat kelancaran pemerintahan dan pembangunan SUMSEL dan tidak jarang pula menyebabkan kekecewaan pada masyarakat. Salah satunya adalah pegawai di BKD Prov. SUMSEL, yang juga menjadi obyek dalam penelitian ini. Pegawai di BKD Prov. SUMSEL sebagai salah satu unsur utama sumber daya manusia aparatur negara.

Berikut daftar jumlah ASN BKD Prov. SUMSEL:

**Tabel 1. Jumlah ASN di BKD PEMPROV SUMSEL berdasarkan Golongan tahun 2017**

NO	GOLONGAN	JUMLAH (ORANG)
1	Golongan IV	8
2	Golongan III	58
3	Golongan II	5
4	Golongan I	-
TOTAL		71

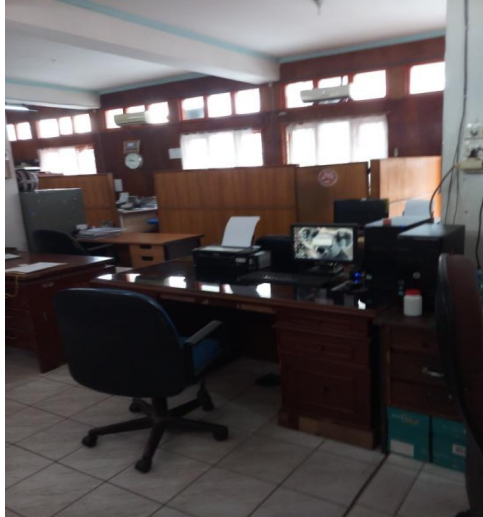
Sumber : Bagian Kepegawaian BKD Prov. SUMSEL 2017 ( Laporan Kinerja Pegawai Tahun 2017 )

Kode Etik dalam diri ASN sangatlah penting dalam kegiatan memberikan layanan kepada masyarakat. Tetapi pada kenyataan di lapangan ditemukan ASN yang tidak menaati peraturan kode etik sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Padahal pegawai BKD Prov. SUMSEL ini mengetahui apa itu kode etik di lingkungan instansi. Hasil wawancara singkat penulis dengan salah satu ASN di BKD Prov. SUMSEL, menyatakan bahwa:

“... Kode etik ini sampai sekarang belum ada pelanggaran yang terjadi di BKD Prov. SUMSEL karena diterapkan setiap hari kerja di lingkungan kerja, terutama di bidang mutasi ada kode etik yang bersimbol R yaitu rahasia berupa sebuah map umpama suatu berkas untuk di naikan kepada kepala sekretaris daerah dan gubernur SUMSEL oleh kepala subbidang di lanjutkan ke kepala bagian di turunkan lagi ke kepala subbidang di periksa dan diteliti agar berkas yang akan di bawa naik kepada kepala sekretaris daerah dan kepada gubernur SUMSEL tidak diketahui oleh orang lain karena bersifat rahasia, dan di BKD Prov. SUMSEL belum ada ASN yang melanggar kode etik. (Wawancara, 03 Agustus 2018)”

Dalam hasil wawancara di atas jelasnya asn di BKD Prov. SUMSEL mengetahui adanya kode etik didalam lingkungan instansi PEMDAProv. SUMSEL.

Mengacu pada Peraturan Gubernur SUMSEL Nomor 48 Tahun 2018 masih ditemukan perilaku yang dilakukan oleh ASN BKD Prov. SUMSEL seperti tidak ada dalam posisi kerja ketika sedang jam kerja yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja Di Lingkungan Lembaga Pemerintah. Fenomena ini dibuktikan dengan meja kerja dalam ruangan yang tidak ada ASN pada tempat tugasnya, gambar tersebut terlihat di bawah ini :



**Gambar 1. Ruangn BKD Prov. SUMSEL Pukul  
10.15 WIB Jum'at Tanggal 02 November 2018**

Gambar 1. Memperlihatkan salah satu perilaku ASN di BKD Prov. SUMSEL, sebagai bukti observasi dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti selama masa penelitian dalam kurun waktu tiga bulan yang dimulai pada tanggal 13 november sesuai surat izin rekomendasi penelitian mahasiswa yang di tanda tangani oleh Plt. Kepala BKD Prov. SUMSEL.

Dan ada pun data mengenai keterangan permasalahan dalam laporan akuntabilitas kinerja instnasi pemerintah tahun 2016 BKD Prov. SUMSEL yang menyatakan, tingkat pelanggaran disiplin ASN belum memenuhi target kinerja yang diharapkan di tahun 2016, hal ini disebabkan masih adanya ASN yang belum memenuhi ketentuan jam kerja (masuk dan pulang kerja) dan pembinaan ASN sesuai PP 53 Tahun 2010 menjadi tanggung jawab atasan langsung dan kepala OPD yang bersangkutan”( Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2016:39)”.

Dan adapun dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun 2017 BKD Prov. SUMSEL juga menyatakan, belum maksimalnya capaian kinerja Persentase Pelanggaran Disiplin Aparatur Prov. Sumsel pada tahun 2017 dikarenakan masih lemahnya



pengawasan dan pembinaan oleh masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan PemProv. Sumsel. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 bahwa pengawasan, pembinaan dan penindakannya terhadap ASN yang melakukan pelanggaran disiplin dilakukan secara berjenjang di mulai dari atasan langsungnya ASN yang bersangkutan”(Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2017:47)”.

Adapun perilaku atau fenomena kejadian ini akan menyebabkan kekecewaan masyarakat terhadap asn di lingkungan pemerintah SUMSEL , dan juga dapat menjadi contoh yang buruk bagi asn di instansi lingkungan pemerintah SUMSEL.

Adanya fenomena pegawai yang tidak ada dalam posisinya ketika sedang melaksanakan kewajiban dan fungsinya sebagai ASN terlihat dari gambar 1. Dari hasil observasi dan bukti foto lokasi salah satu ruangan di BKD Prov. SUMSEL ini, mengindikasikan masih ada perilaku yang tidak sesuai dengan kode etik yang dilakukan oleh ASN di BKD Prov. SUMSEL.

Melihat keterangan diatas maka penegakan kode etik ASN , pemerintah sudah harus melakukan perubahan terhadap hal ini dengan melakukan penelitian, untuk melihat bagaimana kode etik pegawai berdasarkan Peraturan Gubernur SUMSEL Nomor 48 Tahun 2018 dengan lebih memfokuskan pelaksanaan kode etik. Penulis pun memilih judul : “Implementasi Kebijakan Kode Etik ASN di Badan Kepegawaian PEMDAProv. SUMSEL”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian data latar belakang di atas, dirumuskan permasalahan penelitian yaitu bagaimana Implementasi Kebijakan Kode Etik ASN di BKD PEMPROV SUMSEL ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa implementasi kebijakan Peraturan Gubernur Sumsel Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Kode Etik ASN di Lingkungan PEMPROV SUMSEL.

### **D. Manfaat Penelitian**

Ada 2 manfaat yang diperoleh dalam rencana penelitian ini, yaitu :

#### **1. Manfaat Teoritis**

- a) Bagi civitas akademika sebagai perbendaharaan tambahan pengetahuan mengenai sikap kode etik kerja pada BKD Prov. SUMSEL.
- b) Bagi penulis sebagai tambahan pengetahuan tentang pelaksanaan kode etik pegawai yang sangat penting di dalam lingkungan kerja.

#### **2. Manfaat Praktis**

- a) Memberi kontribusi kepada pegawai pada BKD Prov. SUMSEL.
- b) Sebagai bahan masukan bagi BKD Prov. SUMSEL dalam menentukan kebijakan yang berhubungan dengan pelaksanaan kode etik pegawai.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

Agustino, Leo. 2017. Dasar – Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta

Sugiyono, 2007. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta

Syaukani, ad all, 2004, Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Winarno, Budi. 2012. Kebijakan Publik (Teori,Proses, dan Studi Kasus). Online: Caps Publishing.

### **UNDANG-UNDANG**

Republik Indonesia. 2011. Peraturan Presiden Nomor 80 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Indonesia 2010-2025.

Republik Indonesia. 2018. Peraturan Gubernur SUMSEL Nomor 48 Tentang Kode Etik ASN Di Lingkungan Pemerintah Prov. SUMSEL

Republik Indonesia. 2011. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 32 Tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Negara.0

### **DOKUMEN**

Laporan Kinerja Pegawai BKD Prov. SUMSEL Tahun 2016

Laporan Kinerja Pegawai BKD Prov. SUMSEL Tahun 2017

### **SUMBER LAIN**

<http://www.makalahskripsi.com/2013/12/ccontoh-penulisan-daftar-pustaka-skripsi.html>, (diakses 4 maret 2019)

<http://adeku-bahasaku.blogspot.com/2012/02/konjungsi-penggunaannya.html>, (diakses 3 maret 2019)

<http://www.bkd.sumselprov.go.id/>